



JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
<http://ojs.uninus.ac.id/index.php/JPKM>
DOI: <https://doi.org/10.30999/jpkm.v14i1.3016>



IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA MELALUI PENDAMPINGAN FASILITATOR PADA PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK DI KABUPATEN GARUT

Achmad Mudrikah¹, Didin Wahidin², Yana Heryana³

^{1,2,3} Universitas Pasundan, Bandung

korespondensi : achmad.mudrikah@unpas.ac.id

Naskah diterima; 18 Maret 2024; direvisi April 2024, disetujui Mei 2024; publikasi online Juli 2024

Abstract

Implementation of the Independent Curriculum is a curriculum development policy implemented by the Ministry of Education, Culture, Research, Technology and Higher Education for student learning in schools. The development in question is in the form of a variety of intracurricular learning through optimizing content so that students have enough time to deepen concepts and improve competence. Curriculum implementation by schools has begun in 2021, namely by 2,499 first generation schools throughout Indonesia. The number of schools assisted in this activity was 5 elementary schools in Garut district, Jayaraga 1st public elementary school, Lebak Agung 1st public elementary school, Bagendit 4 public elementary school, Cokro Aminoto Integrated Islamic elementary school and Alam Garut Integrated Islamic Elementary School. In an effort to successfully implement the curriculum in the five driving schools, 5 types of interventions were carried out consisting of consultative and asymmetric assistance; strengthening school human resources; learning with a new paradigm; data-based planning; and digitalization of schools. Facilitators who are tasked with providing assistance to principals, teachers and school supervisors, have the aim of creating a student-centered school. In an effort to achieve this goal, the method applied in assisting the five mobilizing schools is Participatory Action Research (PAR). This method was developed in the form of: 1) Encouraging collaboration throughout the school education ecosystem and stakeholders in the district; 2) Developing a Practical Community of School Principals, Teachers and School Supervisors; 3) Developing the competence of School Principals, Teachers and School Supervisors; 4) Monitoring the learning progress of School Principals, School Supervisors and Teachers. The results of the implementation of mentoring activities show that strengthening the resources of school principals, teachers and school supervisors has been achieved in implementing the independent curriculum; achieving an understanding of new paradigm learning; the need to increase understanding of data-based planning and school digitalization.

Keywords: Elementary Schools, Facilitator, Kurikulum Merdeka, Sekolah Penggerak

Abstrak

Implementasi Kurikulum Merdeka adalah kebijakan pengembangan kurikulum yang dilaksanakan kemendikbudristekdikti untuk pembelajaran peserta didik di sekolah. Pengembangan yang dimaksud adalah berupa beragamnya pembelajaran intrakurikuler melalui optimalisasi konten agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan meningkatkan kompetensi. Implementasi Kurikulum oleh sekolah telah mulai dilaksanakan pada tahun 2021 yaitu oleh sekolah-sekolah penggerak angkatan pertama sebanyak 2.499 sekolah di seluruh Indonesia. Adapun jumlah sekolah yang didampingi dalam kegiatan ini sebanyak 5 SD di kabupaten Garut yaitu SDN 1 Jayaraga, SDN 1 Lebak Agung, SDN 4 Bagendit, SD IT Cokro Aminoto dan SD IT Alam Garut. Dalam upaya mensukseskan implementasi kurikulum di lima sekolah penggerak tersebut, dilakukan 5 jenis intervensi yang

terdiri dari pendampingan konsultatif dan asimetris; penguatan sumberdaya manusia sekolah; pembelajaran dengan paradigma baru; perencanaan berbasis data; dan digitalisasi sekolah. Fasilitator yang bertugas melakukan pendampingan kepada kepala sekolah guru dan pengawas sekolah, memiliki tujuan untuk mewujudkan sekolah yang berpusat pada murid. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, metode yang diterapkan pada pendampingan kelima sekolah sekolah penggerak adalah Participary Action Research (PAR). Metode ini dikembangkan dalam bentuk: 1) Mendorong Kolaborasi seluruh ekosistem pendidikan sekolah dan pemangku kepentingan di kabupaten; 2) Mengembangkan Komunitas Praktisi Kepala Sekolah, Guru dan Pengawas Sekolah; 3) Mengembangkan kompetensi Kepala Sekolah, Guru dan Pengawas Sekolah; 4) Melakukan monitoring kemajuan pembelajaran Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Guru. Hasil pelaksanaan kegiatan pendampingan menunjukkan bahwa telah tercapai penguatan sumberdaya kepala sekolah, guru, dan pengawas sekolah dalam melaksanakan implementasi kurikulum merdeka; tercapainya pemahaman tentang pembelajaran paradigma baru; perlunya peningkatan pemahaman tentang perencanaan berbasis data dan digitalisasi sekolah.

A. PENDAHULUAN

Pemenuhan kewajiban anggaran pendidikan sebesar 20% APBN yang telah dilaksanakan oleh pemerintah sejak tahun 2009 demi tujuan peningkatan dan pemerataan pendidikan. Akan tetapi indikator hasil belajar maupun peningkatan kualitas pembelajaran belum menampakkan hasil yang menggembirakan (BSKAP, 2021: 6).

Masalah krisis pembelajaran kemudian diperburuk dengan adanya Pandemi Covid-19 yang berakibat pada terjadinya penurunan intensitas belajar mengajar baik dalam hal jumlah hari belajar dalam seminggu maupun rata-rata jumlah jam belajar dalam sehari. Solusi yang dilakukan sekolah tampak menunjukkan hasil yang tidak efektif dalam mengatasi permasalahan. Hasil dari berbagai studi menunjukkan terjadinya ketertinggalan pembelajaran (learning loss) berupa hilangnya kompetensi yang telah dipelajari sebelumnya oleh siswa, ketidakmampuan siswa dalam menuntaskan pembelajaran di jenjang kelas, serta efek majemuk yang dihadapi akibat tak terkuasainya pembelajaran pada setiap jenjang (kemendikbudristek: 7).

Indrawati, Prihadi dan Siantoro (2020) dalam hasil studinya di sembilan provinsi di Indonesia menyatakan bahwa hanya 68% anak yang mendapatkan akses pembelajaran dari rumah pada awal diterapkannya pembelajaran jarak jauh atau PJJ ketika terjadi pandemi. Lebih lanjut dikatakan bahwa kondisi ini diperburuk dengan minimnya kualitas pembelajaran bagi siswa yang dapat melaksanakan PJJ jika dibandingkan dengan kualitas pembelajaran sebelum terjadinya pandemi. Buruknya kualitas pembelajaran

tersebut sebagai dampak dari pembelajaran yang hanya dalam bentuk instruksi dan umpan balik bagi banyak siswa, serta keterbatasan interaksi dari guru.

Disamping terjadinya ketertinggalan pembelajaran atau learning loss, dampak dari pandemi ini adalah semakin meningkatnya kesenjangan pembelajaran atau learning gap. Kesenjangan pembelajaran yang sejatinya telah terjadi jauh sebelum pandemi, justru semakin melebar dengan adanya fakta berupa pola keberagaman proses pembelajaran selama pandemi. Studi Inovasi dan Puslitjak (2021) menyatakan bahwa resiko dari semakin melebarnya kesenjangan pembelajaran selama COVID-19 akan lebih besar terdampak pada beberapa kelompok siswa dari keluarga dengan latar belakang sosial ekonomi lebih rendah. Mereka lebih beresiko untuk tidak terdaftar lagi atau tidak lagi berpartisipasi dalam proses pembelajaran.

Untuk mengatasi dampak pandemi terhadap ketertinggalan pembelajaran (learning loss) dan kesenjangan pembelajaran (learning gap), pada bulan Agustus 2020 Kemendikbud telah menerbitkan kurikulum darurat pada satuan pendidikan dalam kondisi khusus, yang pada intinya merupakan penyederhanaan dari kurikulum nasional (BSKAP, 2021: 8). Hasil evaluasi dari penerapan kurikulum darurat ini setelah dilaksanakan hampir satu tahun secara umum menunjukkan bahwa siswa pengguna kurikulum darurat mendapatkan hasil asesmen yang lebih baik dari pengguna kurikulum 2013 secara penuh, terlepas dari latar belakang sosial ekonominya. BSKAP (2021: 19) melalui survei

yang dilakukan pada 18.370 siswa kelas 1-3 SD di 612 sekolah di 20 kabupaten/kota dari 8 provinsi selama kurun waktu bulan April – Mei 2021, menunjukkan perbedaan hasil belajar yang signifikan antara kurikulum 2013 dan kurikulum darurat. Selisih skor literasi dan numerasinya setara dengan 4 bulan pembelajaran. Hal ini tampak dari adanya perbedaan signifikan pada skor numerasi antara siswa pengguna kurikulum 2013 yang memperoleh skor 482 dibanding siswa pengguna kurikulum darurat dengan skor 517. Perbedaan signifikan juga terjadi pada skor literasi antara siswa pengguna kurikulum 2013 yang memperoleh skor 532 dibanding siswa pengguna kurikulum darurat dengan skor 570.

Dengan data hasil studi tentang penerapan kurikulum darurat yang dianggap mampu mengatasi sebagian persoalan terutama terkait masalah learning loss dan learning gap yang semakin melebar, maka pemerintah melalui kemendikbudristek telah melakukan berbagai kebijakan. Kebijakan yang dimaksud diantaranya seperti penyederhanaan kurikulum, penyempurnaan kurikulum baru dan pemberian kebebasan dan keleluasaan kepada tingkat satuan pendidikan untuk menggunakan kurikulum yang dianggap sesuai dengan keperluan masing-masing. Pemerintah juga memberikan kebijakan untuk memberikan pelatihan dan pendampingan guru maupun kepala sekolah. Untuk mendukung upaya yang dicanangkan dalam permendikbudristek Nomor 13 tahun 2022 (2022: 55) yang menyatakan: “kurikulum yang terbentuk oleh Kebijakan Merdeka Belajar akan berkarakteristik fleksibel, berdasarkan kompetensi, berfokus pada pengembangan dan keterampilan lunak (soft skills), dan akomodatif terhadap kebutuhan dunia”, maka dianggap perlu dirancang kurikulum yang mendukung. Prinsip yang dijadikan pegangan dalam proses perancangan kurikulum tersebut dalam BSKAP (2021: 29) adalah sebagai berikut: (1) Sederhana, mudah dipahami dan diimplementasikan; (2) Fokus pada kompetensi dan karakter semua peserta didik; (3) Fleksibel; (4) Selaras; (5) Bergotong royong; (6) Memperhatikan hasil kajian dan umpan balik.

Upaya mengimplementasikan kurikulum merdeka di sekolah diawali dengan pelaksanaannya secara terbatas yakni terhadap 2.499 satuan pendidikan sebagai peserta program Sekolah Penggerak dan 901 SMK dari Program SMK Pusat Keunggulan (SMK PK). Tujuan dari penerapan kurikulum Merdeka yang diawali secara terbatas menurut BSKAP (2021: 72) mencakup tiga hal. Pertama, sebagai bagian dari proses penyempurnaan kurikulum sehingga memiliki dampak paling optimal dalam mengurangi resiko learning loss dan meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia di masa yang akan datang. Kedua, untuk menghasilkan praktik-praktik baik bagi guru serta kepala sekolah yang berpengalaman dalam mengadopsi kurikulum yang kemudian dapat diimbaskan pada sekolah lainnya. Ketiga, pendekatan adaptasi kurikulum secara terbatas dan bertahap juga ditujukan untuk memberikan ruang kepada daerah untuk mempersiapkan SDM selama fase adopsi untuk memberikan penguatan kurikulum yang akan digunakan di masa yang akan datang.

Terdapat tiga prinsip kunci yang melandasi strategi implementasi Kurikulum Merdeka dalam rangka pemulihan pembelajaran. Pertama, Kurikulum Merdeka adalah pilihan, sehingga satuan pendidikan dapat mengambil keputusan apakah mereka akan menerapkannya sebagai upaya pemulihan pembelajaran atau tidak. Kedua, implementasi kurikulum adalah proses belajar, sehingga seperti halnya peserta didik belajar sesuai tahap capaian kompetensi mereka, satuan pendidik dan pendidik juga mengimplementasikan kurikulum sesuai tahap kesiapan mereka. Dengan demikian bentuk implementasi kurikulum tidak harus seragam untuk semua satuan pendidikan. Ketiga, bantuan dan dukungan implementasi kurikulum dilakukan secara komprehensif, sebagaimana sistem ekologi yang diadaptasi dari teori Bronfenbrenner (OECD dalam BSKAP, 2021: 106), sehingga intervensi dilakukan untuk mempengaruhi faktor yang langsung dan yang tidak langsung berkaitan dengan implementasi kurikulum.

Dalam hal dukungan untuk implementasi sesuai kebutuhan, pemerintah pusat, perguruan tinggi serta komunitas organisasi pendidikan memiliki peranan penting dalam memberikan layanan peningkatan kapasitas guru dan kepala sekolah di suatu satuan pendidikan. Perguruan tinggi dapat memberikan peran dalam berbagai hal diantaranya adalah dengan melibatkan para dosen untuk menjadi Pelatih Ahli (sekarang istilahnya menjadi Fasilitator) di Sekolah Penggerak.

Program Sekolah Penggerak yang merupakan penyempurnaan program transformasi sekolah sebelumnya dilaksanakan dengan cara kolaborasi antara kemendikbudristek dengan pemerintah daerah di mana komitmen Pemda menjadi kunci utama. Intervensi dalam program sekolah penggerak ini dilakukan secara holistik, mulai dari SDM sekolah, pembelajaran, perencanaan, digitalisasi dan pendampingan pemerintah daerah. Ruang lingkup Program Sekolah Penggerak mencakup seluruh kondisi sekolah, tidak hanya sekolah unggulan saja, baik negeri maupun swasta. Pendampingan dilakukan selama 3 tahun ajaran dan sekolah melanjutkan upaya transformasi secara mandiri. Selanjutnya Program Sekolah Penggerak juga dilakukan terintegrasi dengan ekosistem hingga seluruh sekolah di Indonesia menjadi Sekolah Penggerak.

Dalam implementasi kurikulum merdeka di sekolah penggerak ini seorang Fasilitator memiliki peran dalam mendampingi 5 sampai 7 sekolah. Pendampingan yang dilakukan berupa: in-house training, lokakarya tingkat kabupaten/kota, komunitas belajar/praktisi (kelompok mata pelajaran), program pendampingan/coaching baik 1-on-1 dengan kepala sekolah maupun secara bersama-sama dengan kepala sekolah, pengawas sekolah dan komite pembelajaran. Program ini merupakan program penguatan sumber daya manusia sekolah yang terdiri dari kepala sekolah, pengawas sekolah/penilik dan guru. Disamping penguatan SDM, dilaksanakan juga perancangan pembelajaran paradigma baru berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi agar setiap siswa dapat belajar sesuai kebutuhan dan tahap perkembangannya; perencanaan

berbasis data; dan digitalisasi sekolah dengan menggunakan berbagai platform digital yang bertujuan untuk mengurangi kompleksitas, meningkatkan efisiensi, menambah inspirasi, dan pendekatan yang customized.

Peta capaian Program Pendampingan bagi Kepala Sekolah dan Pengawas terdiri dari 4 aspek yaitu: 1) Aspek Mengembangkan Diri dan Orang Lain dengan capaian berupa: a) kepala sekolah memahami model kompetensi kepemimpinan sekolah, terampil melakukan refleksi dan asesmen diri serta mampu membuat rencana belajar untuk pengembangan diri; b) Kepala sekolah terampil mengembangkan komunitas praktisi yang secara berkala mengidentifikasi kebutuhan belajar guru; c) kepala sekolah dapat berbagi praktik baik dengan rekan sejawatnya di dalam forum di organisasi profesi atau komunitas lain, kepala sekolah memahami nilai pendidikan yang toleran, inklusif dan memuliakan hak anak serta terampil mengembangkan sekolah nyaman bagi murid dan guru. 2) Aspek Memimpin Pembelajaran dengan capaian berupa: a) kepala sekolah memahami prinsip ekosistem sekolah yang berpihak pada murid, mulai membangun budaya positif di sekolah, melakukan survey kepada komunitas sekolah dan merancang visi dan misi bersama komunitas sekolah; b) kepala sekolah memahami prinsip dan implementasi pembelajaran yang berpusat pada murid, mengidentifikasi kegiatan yang menunjang, memimpin proses diskusi untuk mengembangkan pembelajaran berpusat pada murid; c) kepala sekolah memahami berbagai macam strategi pengumpulan data, dapat menganalisis data perkembangan belajar murid, memfasilitasi refleksi guru dengan berbagai teknik refleksi sederhana; d) Kepala sekolah memetakan latar belakang orang tua dan strategi pendekatan pada orang tua, memahami peran orang tua dan memetakan strategi pelibatan dan komunikasi kepada orang tua sebagai pendamping dan sumber belajar di sekolah. 3) Aspek Kepemimpinan Manajemen Sekolah dengan capaian berupa: a) kepala sekolah mengidentifikasi peluang dan tantangan sekolah dalam menjalankan visi misi sekolah yang berorientasi pada murid, memfasilitasi keikutsertaan warga sekolah dalam

menyusun visi dan misi sekolah, bersama warga sekolah merancang pelaksanaan program, dan mengomunikasikan visi dan misi sekolah melalui berbagai media; b) kepala sekolah mampu mengidentifikasi beragam aset yang dimiliki sekolah untuk pengembangan program sekolah dan memahami proses tahapan merancang program yang sesuai peta kebutuhan murid. 4) Aspek Kepemimpinan Pengembangan Sekolah dengan capaian berupa: a) Kepala sekolah melakukan stakeholder mapping pihak-pihak atau pemangku kepentingan yang dapat mendukung program di sekolah, membangun komunikasi positif dan jejaring dengan tokoh dan pemangku kebijakan di lingkungan setempat dan menyampaikan kepada masyarakat tentang peran mereka untuk terlibat dalam membangun pendidikan; b) kepala sekolah mampu mengomunikasikan berbagai kegiatan sekolah yang menunjang kemajuan murid dan menyediakan berbagai alternatif peran yang dapat diambil oleh masyarakat, mengajak seluruh orang tua/wali murid dan pemangku kepentingan untuk berpartisipasi aktif dalam mengembangkan potensi murid, dan memotivasi seluruh warga sekolah dalam membudayakan kerja sama dengan orang tua dan komunitas dalam pengembangan potensi murid.

Sementara itu Peta capaian Program Pendampingan untuk guru terdiri dari: 1) Aspek Pengetahuan Profesional dengan target capaian berupa: a) guru terampil menyusun konsep dan menjelaskan prasyaratnya untuk menjadi alur belajar yang urut dan meningkatkan kompleksitasnya; b) guru terampil menjelaskan tahap penguasaan pengetahuan murid berdasarkan pemahaman terhadap proses belajar, kebutuhan, tahap perkembangan, dan latar belakang murid; c) guru terampil menetapkan tujuan belajar sesuai dengan perkembangan murid, kurikulum dan profil pelajar Pancasila. 2) Aspek Praktik Pembelajaran Profesional dengan target capaian berupa: a) guru menggunakan beberapa strategi komunikasi dalam mengembangkan dan memelihara lingkungan belajar yang memungkinkan murid belajar secara aman dan nyaman, melibatkan partisipasi aktif murid untuk menjaga suasana belajar yang aman dan

nyaman; b) guru mampu menyusun desain dan melaksanakan pembelajaran sesuai dengan tujuan bermakna dan mengikutsertakan murid yang menumbuhkan kegemaran belajar murid; c) guru terampil merancang bentuk asesmen yang sesuai dengan tujuan bermakna, melakukan asesmen dan memberi umpan balik serta menyampaikan laporan belajar kepada murid/wali murid. 3) Aspek Pengembangan Profesi Berkelanjutan dengan target capaian berupa: a) guru terampil dan terbiasa melakukan refleksi terhadap praktik pembelajaran dan pendidikan untuk mengetahui aspek kekuatan dan kelemahan sebagai guru; b) guru memahami prinsip-prinsip perlindungan anak dan terampil merancang kelas yang ramah anak; c) guru memahami nilai pendidik yang toleran, inklusif, dan memuliakan hak anak serta terampil mengembangkan sekolah nyaman bagi murid dan guru serta terampil meregulasi emosi; d) guru memahami pentingnya kolaborasi dalam pengembangan diri dan pengembangan pembelajaran serta terampil melakukan ragam kolaborasi yang dapat dilakukan dengan rekan sejawat; e) guru terlibat aktif dalam komunitas atau organisasi profesi yang menyediakan program pengembangan diri.

B. METODE

Pengabdian pada masyarakat ini dilaksanakan di 5 sekolah dasar di Kabupaten Garut yang merupakan peserta Program Sekolah Penggerak angkatan pertama. Kelima sekolah penggerak tersebut yaitu SDN 1 Jayaraga, SDN 1 Lebak Agung, SDN 4 Bagendit, SD IT Cokro Aminoto dan SDIT Alam Garut. Pola Pendampingan yang dilakukan terhadap kelima sekolah tersebut di atas terdiri dari Coaching secara daring one-on-one dengan kepala sekolah, pertemuan rutin secara daring dengan Pokja Manajemen Operasional (PMO) level sekolah, penguatan komite pembelajaran, lokakarya, Forum Pemangku Kepentingan Daerah dan Pelatihan Kepala Sekolah mengenai perencanaan berbasis data dan pengelolaan sumber daya berbasis sekolah.

Coaching dan pertemuan PMO level sekolah dilaksanakan rutin setiap bulan sebanyak 10 kali dalam satu tahun. Penguatan Komite Pembelajaran dilaksanakan secara luring sebanyak 4 kali dalam satu tahun. Topik penguatan Komite Pembelajaran terdiri dari: Refleksi kompetensi dan pembuatan rencana belajar; umpan balik rekan sejawat; berbagi pengetahuan melalui cerita dan dokumen sumber belajar; merancang dan memandu refleksi.

Lokakarya dengan kepala sekolah dan pengawas sekolah dilaksanakan sebanyak 8 kali terdiri dari Topik-Topik sebagai berikut: Lokakarya 0 membahas proses belajar di sekolah penggerak; Lokakarya 1 membahas Kepala sekolah sebagai Pemimpin Pembelajaran; Lokakarya 2 membahas tentang Penggunaan data sekolah untuk peningkatan kualitas pembelajaran; Lokakarya 3 membahas tentang Pembelajaran sosial emosional untuk mewujudkan sekolah yang aman dan nyaman; Lokakarya 4 membahas tentang identifikasi sumber daya untuk pengembangan program sekolah; Lokakarya 5 membahas tentang merancang visi misi dan program sekolah sesuai kebutuhan murid; Lokakarya 6 membahas tentang menjalin kemitraan untuk mendukung program pendidikan di sekolah; Lokakarya 7 membahas tentang strategi komunikasi menyampaikan visi dan misi sekolah yang berorientasi pada murid; dan Lokakarya 8 membahas tentang pelibatan orang tua/wali murid dan masyarakat dalam pengembangan sekolah.

Forum pemangku kepentingan daerah dilaksanakan sekali dalam satu semester sehingga dalam satu tahun ajaran telah dilaksanakan sebanyak dua kali. Ini merupakan kegiatan diskusi berkenaan dengan upaya peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan di tingkat kabupaten/kota. Seluruh pemangku kepentingan yang terlibat akan merefleksikan capaian kemajuan pendidikan di daerahnya. Kegiatan ini dilaksanakan selama 8 JP di tingkat kabupaten/kota.

Pelatihan bagi kepala sekolah dilakukan dengan pembahasan tentang Perencanaan

Berbasis Data dan pengelolaan sumber daya sekolah selama 16 Jam Pelatihan dengan sasaran kegiatan adalah kepala sekolah dan operator sekolah.

Pelaksanaan pendampingan oleh Fasilitator di sekolah penggerak berfokus pada muatan materi yang terkait dengan Pembelajaran Paradigma Baru, penggunaan platform digital, serta keterampilan yang menunjang peningkatan kompetensi meliputi: a) Kompetensi Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah dalam aspek pengembangan diri dan orang lain, kepemimpinan pembelajaran, manajerial, dan pengembangan sekolah. b) Kompetensi guru dalam aspek penguasaan pengetahuan profesional, praktik pembelajaran profesional, dan pengembangan profesi berkelanjutan. Informasi tentang data kompetensi kepala sekolah, pengawas sekolah maupun guru tersebut diperoleh dalam seluruh rangkaian kegiatan pendampingan berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan melalui kunjungan ke lapangan (setiap satuan pendidikan), Coaching dan wawancara pada Pokja Manajemen Operasional.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil coaching terhadap kepala sekolah dan catatan hasil pertemuan bersama para guru, pengawas dan kepala sekolah di penguatan komite pembelajaran maupun pertemuan Pokja Manajemen Operasional level sekolah, maka kompetensi tiap aspek dilihat dari indikator-indikator yang dicapai tiap sekolah diperoleh sebagai berikut:

A. Aspek Peta Capaian Kepala Sekolah

Aspek peta capaian Kepala Sekolah memuat empat kompetensi yang terdiri dari: mengembangkan diri dan orang lain, memimpin pembelajaran, kepemimpinan manajemen sekolah, dan kepemimpinan pengembangan sekolah. Seluruh kompetensi dari setiap sekolah disajikan dalam tabel 1 sampai 4 berikut.

Tabel 1: Mengembangkan Diri dan Orang Lain

Nama Sekolah	% Jumlah Indikator Kompetensi yang Dicapai				rata rata
	K.1	K.2	K.3	K.4	
SDN 4 Bagendit	50	40	60	75	56,3
SDN 1 Jayaraga	75	80	80	75	77,5
SDN1 Lebak Agung	50	40	60	75	56,3
SD IT Cokro Aminoto	75	60	80	75	72,5
SDIT Alam Garut	75	60	80	75	72,5
Rata-Rata	65	56	72	75	67

Keterangan:

- K.1: Kemampuan menunjukkan praktik pengembangan diri
- K.2: Kemampuan mengembangkan kompetensi warga sekolah
- K.3: Partisipasi aktif dalam organisasi profesi
- K.4: Kematangan spritual, moral dan emosional

Tabel 2: Memimpin Pembelajaran

Nama Sekolah	% Jumlah Indikator Kompetensi yang Dicapai				rata rata
	K.1	K.2	K.3	K.4	
SDN 4 Bagendit	75	50	50	50	56,3
SDN 1 Jayaraga	75	75	50	83	70,8
SDN1 Lebak Agung	50	50	25	50	68,8
SD IT Cokro Aminoto	75	75	50	67	66,8
SDIT Alam Garut	75	75	50	67	66,8
Rata-Rata	70	65	45	63,4	65,9

Keterangan:

- K.1: Kemampuan memimpin upaya pengembangan lingkungan belajar yang berpusat pada murid
- K.2: Kemampuan memimpin perencanaan dan pelaksanaan proses belajar yang berpusat pada murid
- K.3: Kemampuan memimpin refleksi dan perbaikan kualitas proses belajar yang berpusat pada murid
- K.4: Kemampuan melibatkan orang tua/wali

murid sebagai pendamping dan sumber belajar

Tabel 3: Kepemimpinan Manajemen Sekolah

Nama Sekolah	% Jumlah Indikator Kompetensi yang Dicapai		
	K.1	K.2	rata rata
SDN 4 Bagendit	40	43	41,5
SDN 1 Jayaraga	80	71	75,5
SDN1 Lebak Agung	40	43	41,5
SD IT Cokro Aminoto	60	57	58,5
SDIT Alam Garut	60	57	58,5
Rata-Rata	56	54,2	55,1

Keterangan:

- K.1: Kemampuan mengembangkan dan mewujudkan visi sekolah yang berorientasi pada murid
- K.2: Kemampuan memimpin dan mengelola program sekolah

Tabel 4: Kepemimpinan Pengembangan Sekolah

Nama Sekolah	% Jumlah Indikator Kompetensi yang Dicapai		
	K.1	K.2	rata rata
SDN 4 Bagendit	67	67	67
SDN 1 Jayaraga	83	67	75
SDN1 Lebak Agung	67	67	67
SD IT Cokro Aminoto	67	67	67
SDIT Alam Garut	67	67	67
Rata-Rata	70,2	67	68,6

Keterangan:

- K.1: Kemampuan melakukan stakeholder mapping pihak-pihak atau pemangku kepentingan yang dapat mendukung program di sekolah.
- K.2: Kemampuan mengomunikasikan berbagai kegiatan sekolah yang menunjang kemajuan murid.

B. Aspek Peta Capaian Guru

Aspek peta capaian Guru memuat tiga

kompetensi yang terdiri dari: pengetahuan profesional, praktik pembelajaran profesional, dan pengembangan profesi berkelanjutan. Seluruh kompetensi guru dari setiap sekolah disajikan dalam tabel 5 sampai 7 berikut.

Tabel 5: Pengetahuan Profesional

Nama Sekolah	% Jumlah Indikator Kompetensi yang Dicapai				rata rata
	K.1	K.2	K.3		
SDN 4 Bagendit	75	75	75		75
SDN 1 Jayaraga	75	75	75		75
SDN1 Lebak Agung	75	75	75		75
SD IT Cokro Aminoto	75	75	75		75
SDIT Alam Garut	75	75	75		75
Rata-Rata	75	75	75		75

Keterangan:

- K.1:Kemampuan menyusun konsep dan menjelaskan prasyaratnya untuk menjadi alur belajar yang urut dan meningkatkan kompleksitasnya
- K.2: Kemampuan menjelaskan tahap penguasaan pengetahuan murid.
- K.3: Kemampuan menetapkan tujuan belajar sesuai dengan perkembangan murid, kurikulum dan profil pelajar Pancasila.

Tabel 6: Praktik Pembelajaran Profesional

Nama Sekolah	% Jumlah Indikator Kompetensi yang Dicapai				rata rata
	K.1	K.2	K.3	K.4	
SDN 4 Bagendit	50	40	50	66,7	51,7
SDN 1 Jayaraga	66,7	66,7	66,7	66,7	66,7
SDN1 Lebak Agung	50	40	50	66,7	51,7
SD IT Cokro Aminoto	50	60	66,7	66,7	56,9
SDIT Alam Garut	66,7	66,7	66,7	66,7	66,7
Rata-Rata	56,7	54,7	60	66,7	59,5

Keterangan:

- K.1: Kemampuan menggunakan beberapa strategi komunikasi dalam mengembangkan dan memelihara lingkungan belajar.
- K.2: Kemampuan menyusun desain

dan melaksanakan pembelajaran .

- K.3: Kemampuan merancang bentuk asesmen yang sesuai dengan tujuan bermakna.
- K.4: Kemampuan melakukan asesmen dan memberi umpan balik serta menyampaikan laporan belajar kepada murid/wali murid.

Tabel 7: Pengembangan Profesi Berkelanjutan

Nama Sekolah	% Jumlah Indikator Kompetensi yang Dicapai					rata rata
	K.1	K.2	K.3	K.4	K.5	
SDN 4 Bagendit	50	67	60	60	67	60,8
SDN 1 Jayaraga	75	67	80	80	67	73,8
SDN1 Lebak Agung	50	67	60	60	67	60,8
SD IT Cokro Aminoto	75	67	80	80	67	73,8
SDIT Alam Garut	75	67	80	80	67	73,8
Rata-Rata	65	67	72	72	67	68,6

Keterangan:

- K.1: Kemampuan melakukan refleksi terhadap praktik pembelajaran dan pendidikan
- K.2: Kemampuan memahami prinsip-prinsip perlindungan anak dan terampil merancang kelas yang ramah anak
- K.3: Kemampuan memahami nilai pendidik yang toleran, inklusif, dan memuliakan hak anak
- K.4: Kemampuan memahami pentingnya kolaborasi dalam pengembangan diri dan pengembangan pembelajaran
- K.5: Keterlibatan secara aktif dalam komunitas atau organisasi profesi yang menyediakan program pengembangan diri

Berdasarkan data pada Tabel 1, dapat dikatakan bahwa capaian rata-rata dari keseluruhan sebesar 67% secara umum menunjukkan capaian kepala sekolah dalam hal mengembangkan diri dan orang lain masih kurang memuaskan. Rata-ratakemampuan menunjukkan praktik pengembangan diri baru sebesar 65%.Hal ini terjadi karena hampir seluruh

kepala sekolah belum terampil melakukan refleksi dan asesmen diri. Kemampuan mengembangkan kompetensi warga sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sebesar 56% akibat kebutuhan belajar warga sekolah belum dipetakan dengan baik, pendampingan terhadap guru masih minim secara kuantitas maupun kualitas. Partisipasi aktif dalam organisasi profesi mencapai 72%, hanya kurang dalam inisiatif pengembangan dan pemberdayaan jejaring dan organisasi kepemimpinan sekolah. Kematangan spiritual, moral dan emosional untuk berperilaku sesuai kode etik mencapai 75% secara umum belum dalam tahap mampu menerapkan strategi untuk menghindari pelanggaran kode etik dan konflik kepentingan. Sementara indikator lainnya telah dicapai.

Capaian Kepala Sekolah sebagai Pemimpin Pembelajaran pada tahun pertama secara umum berdasarkan Tabel 2, mencapai 65,9%. Kemampuan memimpin upaya pengembangan lingkungan belajar yang berpusat pada murid sebesar 70% masih terkendala dengan upaya memastikan guru melibatkan murid dalam membangun lingkungan belajar yang kondusif. Kemampuan memimpin perencanaan dan pelaksanaan proses belajar yang berpusat pada murid untuk seluruh kepala sekolah ada di kisaran sebesar 65%. Hal yang paling terkendala adalah tentang penyediaan dukungan agar guru fokus dalam melaksanakan proses pembelajaran dan keteladanan menunjukkan praktik pembelajaran berpusat pada murid. Kemampuan memimpin refleksi dan perbaikan kualitas proses belajar yang berpusat pada murid tergolong rendah yakni sebesar 45%. Ini terjadi karena kepala sekolah relatif kurang mampu membimbing guru untuk melakukan perbaikan kualitas proses belajar dan kurang mampu memimpin pertemuan refleksi secara berkala untuk perbaikan kualitas belajar. akibat kebutuhan belajar warga sekolah belum dipetakan dengan baik, pendampingan terhadap guru masih minim secara kuantitas maupun kualitas. Kemampuan melibatkan orang tua/wali murid sebagai pendamping dan sumber belajar ada pada taraf 63,4% yang berarti rata-rata hanya 4 dari 6 indikator yang dapat dipenuhi. Penyediaan kesempatan bagi orang/wali dan

pendorong untuk menggunakan kesempatan terhadap mereka masih lemah.

Capaian Kepala Sekolah dalam aspek Kepemimpinan Manajemen Sekolah berdasarkan tabel 3, masih tergolong rendah yakni hanya mencapai 55,1%. Kemampuan mengembangkan dan mewujudkan visi sekolah yang berorientasi pada murid serta kemampuan memimpin dan mengelola program sekolah hanya ada di kisaran 56% dan 54,2%. Kurangnya kemampuan mengembangkan dan mewujudkan visi sekolah dilandasi pada kurangnya memberi kesempatan pada warga sekolah untuk mencoba pendekatan baru, dan mengevaluasi implementasi program secara berkala. Sementara untuk kepemimpinan kepala sekolah dalam pengembangan sekolah, berdasarkan tabel 4 dapat dikatakan telah cukup baik terutama kemampuan kepala sekolah dalam melakukan stakeholder mapping pihak-pihak atau pemangku kepentingan yang dapat mendukung program di sekolah.

Pada aspek peta capaian guru, dalam pengetahuan profesional mereka berdasarkan tabel 5 dapat dikatakan telah cukup baik dengan rata-rata capaian sebesar 75%. Akan tetapi hal ini tak didukung dengan aspek praktik pembelajaran profesional dan pengembangan profesi berkelanjutan. Pada praktik pembelajaran profesional berdasarkan tabel 6 dapat dilihat bahwa rata-rata secara keseluruhan sebesar 59,5% yang dapat dianggap kurang memuaskan. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan guru dalam menggunakan beberapa strategi komunikasi, menyusun desain, merancang bentuk asesmen yang sesuai serta melakukan asesmen dan umpan balik masih kurang memuaskan. Sementara untuk pengembangan profesi berkelanjutan berdasarkan tabel 7 dengan rata-rata sebesar 68,6%, cukup baik. Kekurangan pada aspek ini masih terjadi pada kemampuan guru dalam melakukan refleksi terhadap praktik pembelajaran dan pendidikan.

Berdasarkan hasil di atas proses pendampingan yang sebetulnya telah terencana dengan baik dan dilaksanakan secara terjadwal dalam satu tahun, masih belum memberikan

dampak yang cukup baik untuk aspek peta capaian kepala sekolah maupun aspek peta capaian guru. Hal mencolok yang perlu mendapat perhatian dari masing-masing aspek tersebut adalah:

1. Capaian Kepala sekolah terdiri dari: a) kemampuan mengembangkan kompetensi warga sekolah; b) kemampuan memimpin refleksi dan perbaikan; c) kemampuan mengembangkan dan mewujudkan visi sekolah; dan d) kemampuan memimpin dan mengelola program sekolah.
2. Capaian Guru terdiri dari: a) kemampuan menggunakan beberapa strategi komunikasi; b) kemampuan menyusun dan melaksanakan desain pembelajaran; c) kemampuan merancang bentuk asesmen yang sesuai; dan d) kemampuan melakukan refleksi terhadap praktik pembelajaran

Dari keempat kemampuan kepala sekolah yang diamati, seluruhnya menunjukkan tentang tantangan besar sekaligus apa yang harus dilakukan oleh seorang kepala sekolah terutama dalam era revolusi industri saat ini. Kesiapan kepala sekolah menurut Nur, dkk. (2023) dan Julaiha (2019) senantiasa diharuskan untuk mengamati suasana, keadaan serta kearifan lokal yang terdapat di lingkungan sekolah yang dipimpinnya. Jika dikaitkan lagi dengan kepemimpinan pembelajaran, seorang kepala sekolah sebaiknya dapat memastikan dengan baik bahwa kurikulum merdeka telah dipahami oleh semua guru dan staf sekolah serta siap diimplementasikan di dalam kelas (Soim, 2021). Dengan demikian, setiap kendala yang dihadapi dalam upaya meningkatkan capaian kepala sekolah dapat dilakukan dengan memberikan skala prioritas terhadap kemampuan mengembangkan dan mewujudkan visi sekolah dan kemampuan memimpin dan mengelola program sekolah.

Sementara itu untuk capaian guru dari keempat kemampuan yang harus lebih ditingkatkan tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa guru sepertinya kurang memahami atas makna dari perubahan kurikulum. Ketika aspek profesionalisme tidak menjadi kendala, maka

yang perlu diperhatikan ada sikap dan pola pikir guru dalam menghadapi perubahan. Hal ini selaras dengan apa yang disampaikan oleh Sagita dan Arsanti (2022) bahwa satuan pendidikan dan guru memiliki tugas mengoperasionalkan dan mengimplementasikan kurikulum yang telah disusun pemerintah pusat.

Dari apa yang telah dianalisis maka apa yang dilakukan pada tahun ke-2 dapat lebih menekankan pada perencanaan dan implementasi dari aksi nyata yang telah dibuat dan disusun oleh seluruh anggota komunitas pembelajar. Apa yang telah dilaksanakan dapat senantiasa direfleksikan secara mandiri melalui kepemimpinan kepala sekolah dalam memimpin proses refleksi baik pada forum PMO maupun forum dengan komunitas pembelajar.

D. SIMPULAN

Peta Capaian Program Pendampingan bagi Kepala Sekolah pada tahun pertama dapat dikatakan belum berhasil atau belum maksimal. Keseluruhan aspek peta capaian kepala sekolah terutama dalam hal kepemimpinan manajemen sekolah sangat kurang. Sementara pada aspek peta capaian guru, hal yang paling minim adalah aspek praktik pembelajaran profesional. Padahal dibutuhkan sebuah upaya bersungguh-sungguh dari berbagai pihak terutama kepala sekolah dan guru dalam mensukseskan program sekolah penggerak ini. Upaya pendampingan yang telah dilaksanakan perlu lebih dimaksimalkan lagi terutama dalam memberikan target-target capaian yang diharapkan untuk kemudian direalisasikan oleh kepala sekolah maupun guru. Evaluasi terhadap implementasi dari rencana aksi nyata harus lebih ditingkatkan lagi kualitasnya dengan melibatkan pengawas sekolah sebagai bagian tak terpisahkan dari pelaksanaan program sekolah penggerak ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Andari, Eni. 2022. *Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Menggunakan Learning System (LMS)*. Jurnal Pendidikan Profesi

- Guru. 01(02), 65-79
- Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. 2022. *Kajian Akademik. Kurikulum untuk Pemulihan Pembelajaran*. Pusat Kurikulum dan Pembelajaran Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
- Indrawati, M., Prihadi, C., & Siantoro, A. 2020. *The Covid-19 Pandemic Impact On Children's Education In Disadvantaged And Rural Area Across Indonesia*. International Journal of Education (IJE). 8(4), 19-34.
- Jandric, Petar. & McLaren, Peter. 2021. *From Learning Loss to Learning Opportunity. Educational Philosophy and Theory*. DOI: 10.1080/00131857.2021.2010544
- Julaiha, Siti. 2019. *Konsep Kepemimpinan Kepala Sekolah*. Tarbiyah Wa Ta'lim: Jurnal Penelitian Pendidikan & Pembelajaran. 6(3). 51-62
- Nur, F. N., Rahman, M. H., Bakar, M. T. 2023. *Kepemimpinan Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Sekolah di Era Revolusi Industri 4.0*. Manajemen Kreatif Jurnal. 1(1), 99-110
- Permendikbudristek. No. 13. 2022. *Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020-2024*
- Puslitjak. 2021. *Dampak Penyederhanaan Kurikulum Terhadap Capaian Pembelajaran*. Risalah Kebijakan. No. 29.
- Putri, Yuni Sagita., Arsanti, Meilan. 2022. *Kurikulum Merdeka Belajar Sebagai Pemulihan Pembelajaran*. Prosiding Seminar Nasional Sultan Agung ke-4. 21-26
- Sari, A. J. D. R., Giatman, M., Ernawati. 2021. *Peran Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan*. Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pendidikan 5(3), 329-333
- Soim. 2021. *Kepemimpinan Kepala Sekolah pada Kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka: Panduan Implementasi di Sekolah Menengah Pertama*. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
- Yasella, M., Nurcahyani, F., Yuliana, C., Rangkuti, A., Lestari, S., Ni'maturrohman, W., Ferayanti, M. 2023. *Panduan Pelaksanaan Pendampingan oleh Fasilitator Sekolah Penggerak*. Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.